

Evaluasi Program Jambanisasi di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Amni Matholiul Hikmah¹, Rupiarsieh², Ana Kumalasari^{3*} Erwan Subandi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bojonegoro,

*Coressponding author : anakumala30@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 April 2024]

Revised [12 April 2024]

Accepted [25 April 2024]

KATA KUNCI

Evaluasi; Jambanisasi; Sanitasi

KEYWORDS

Evaluation; Latrine; Sanitation

This work is licensed under a



ABSTRAK

Program jambanisasi merupakan program dari pemerintah daerah tuban tentang pengalokasian besaran bantuan khusus jambanisasi kepada desa tahun 2022. Program ini bertujuan untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, dan mendukung program universal akses air minum dan sanitasi khususnya jamban sehat. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan teori dari Daniel Stufflebeam yakni evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product). Yang meliputi kontesek tujuan dan sasaran dibuatnya program, input yang dapat menunjang keberhasilan program, proses pelaksanaan proram dan produk yang dihasilkan oleh program. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang perlu dievaluasi yaitu terkait penentuan sasaran yang dirasa kurang tepat karena dalam proses penentuannya tidak mengacu pada juknis yakni tidak melaksanakan rembung desa. hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar pada tahun selanjutnya tidak terjadi permasalahan seperti ini. Namun, dalam hal pendanaan tidak ditemukan masalah yang signifikan atau tidak terjadi masalah. Hasil jamban sesuai dengan kriteria dan dana yang diberikan dapat digunakan secara maksimal.

ABSTRACT

The latrine program is a program from the Tuban local government regarding allocating the amount of special latrine assistance to villages in 2022. This program aims to strengthen efforts for clean and healthy living behavior, prevent environment-based diseases, and support universal programs for access to drinking water and sanitation, especially healthy latrines. The type of research in this study is qualitative using the theory from Daniel Stufflebeam, namely the CIPP (Context, Input, Process and Product) evaluation. Which includes the context of the goals and objectives of the program, inputs that can support the success of the program, the process of implementing the program and the products produced by the program. In its implementation, there are several problems that need to be evaluated, namely related to targeting which is felt to be inappropriate because in the determination process it does not refer to technical guidelines, namely not carrying out village meetings. this is important to do so that in the following year problems like this do not occur. However, in terms of funding, no significant problems were found or there were no problems. The results of the latrines are in accordance with the criteria and the funds provided can be used optimally

Pendahuluan

Kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan yang bersih memungkinkan seseorang untuk dapat hidup sehat pula. Pada modul yang dikeluarkan oleh kementerian sosial republik indonesia, Penguatan Kapabilitas Anak Dan Keluarga disebutkan bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. Dari hal ini, menurut Soekidjo (2006: 137) perilaku hidup sehat adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang

untuk menciptakan dan meningkatkan kesehatannya. Pola hidup bersih dan sehat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, baik secara fisik maupun mental. Kebiasaan sehat dapat mengurangi risiko berbagai penyakit, termasuk yang mungkin diturunkan dalam keluarga. Menerapkan hidup sehat dapat dimulai dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman sehingga dapat meningkatkan imunitas dan kualitas hidup sehingga tidak gampang sakit.

Pada suatu masyarakat, manfaat dari pola hidup sehat serta lingkungan yang bersih maka kualitas kesehatan di Indonesia semakin naik. Dengan adanya pola hidup sehat maka masyarakat akan meminimalisir suatu penyakit. Kebersihan lingkungan pun sangat bermanfaat, lingkungan yang bersih akan membuat masyarakat semakin sehat.

Penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sudah seharusnya menjadi kebiasaan sehari-hari. Meski terkesan sederhana, pada kenyataannya, masih banyak orang yang kurang memperhatikan pentingnya PHBS bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Perilaku hidup tidak sehat rentan membuat seseorang lebih berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan atau penyakit tertentu. Apalagi jika perilaku tidak sehat tersebut berdampak pada lingkungan yang dijangkau masyarakat. Meski lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup namun Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dapat berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Hubungan antara lingkungan dan kesehatan manusia berkaitan dengan kondisi lingkungan di sekitar manusia tinggal. Ketika lingkungan yang ditinggali tidak terjaga kebersihannya, hal itu akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa setidaknya ada beberapa penyakit yang disebabkan menurunnya kualitas kesehatan karena lingkungan yang kotor, yaitu malaria, kanker, diare, dan masih banyak lagi. Diantara perilaku yang menjadikan lingkungan kotor ialah adanya tumpukan sampah, pencemaran udara, tanah hingga air yang salah satunya akibat kebiasaan masyarakat yang BAB sembarangan.

Perilaku buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi di Indonesia. Di sejumlah daerah, masyarakat masih BAB sembarangan di sawah, sungai, laut bahkan di lahan kosong. Data *Joint Monitoring Program* WHO/UNICEF 2014, sebanyak 55 juta penduduk di Indonesia masih berperilaku BAB sembarangan. Mereka pun bisa mandi dan mencuci pakaian di sungai yang sama. Akibatnya, mereka rentan terkena penyakit diare. Selain diare, balita mudah terserang pneumonia dari pencemaran tinja melalui udara. Dampak penyakit yang paling sering terjadi akibat buang air besar sembarangan ke sungai adalah *Escherichia coli*. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2012, sebanyak 39-40 juta orang yang buang air besar sembarangan. Riset yang dilakukan UNICEF dan WHO, juga menyatakan lebih dari 370 balita Indonesia meninggal akibat perilaku buruk BAB sembarangan.

BAB Sembarangan adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di tempat terbuka seperti ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka

lainnya dan jika dibiarkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, tanah, udara, air serta menimbulkan penyakit (Murwati, 2012). Kotoran manusia mengandung organisme patogen yang dibawa air, makanan, lalat menjadi penyakit seperti salmonella, vibriokolera, disentri, diare dan lainnya. Kotoran mengandung agen penyebab infeksi masuk saluran pencernaan (Warsito, 1996 dalam Tarigan, 2008)

Tempat pembuangan kotoran manusia merupakan hal yang sangat penting, dan harus selalu bersih, mudah dibersihkan, cukup cahaya dan cukup ventilasi, harus rapat sehingga terjamin rasa aman bagi pemiliknya, dan jaraknya cukup jauh dari sumber air. (Adam, 2019). Menurut Soeparman (2003), jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkan. Menurut Proverawati dan Rahmawati (2012), Jenis – jenis jamban yang digunakan diantaranya adalah Jamban cemplung yakni jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan kotoran/tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung diharuskan terdapat penutup agar tidak berbau. Kemudian ada Jamban tangki septic/leher angsa yakni jamban yang berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septic ke air yang berfungsi sebagai proses penguraian/dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapan. Ada pula, Jamban leher angsa (angsa latrine) merupakan jenis jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Jamban ini berbentuk leher angsa sehingga akan selalu terisi air, yang berfungsi sebagai sumbat sehingga bau dari jamban tidak tercium dan mencegah masuknya lalat ke dalam lubang (Ferllando dan Asfawi, 2015).

Ketersediaan sarana jamban keluarga merupakan salah satu faktor utama pembentukan perilaku hidup sehat (Meiridhawati 2012). Namun sebagian besar dari masyarakat yang tidak memiliki jamban, tidak dapat membangun jamban layak sebab kurangnya ekonomi yang membuat masyarakat terpaksa melakukan buang air besar di sembarang tempat misalnya sungai atau lahan terbuka. (John Njuguna, 2021)

Salah satu kabupaten yang masih tinggi tingkat BAB sembarangan ialah Kabupaten Tuban. Dinas kesehatan P2KB Kab. Tuban mencatat bahwa masyarakat yang BAB Sembarangan dari 2021 sampai 2022 tergolong menurun.

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian diketahui bahwa desa klumpit merupakan desa dengan masyarakat yang belum memiliki jamban tertinggi di Kecamatan Soko. kepemilikan jamban sangat erat kaitannya dengan perilaku keluarga terhadap penggunaan jamban, artinya keluarga yang memiliki jamban berpeluang 27 kali untuk menggunakan jamban sebagai tempat buang air besar dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki jamban. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa salah satu faktor sumber hidup tidak sehat ialah akibat kebiasaan BAB sembarangan (Pane, 2009).

Selain data tersebut saat observasi pra penelitian juga ditemukan beberapa masalah terkait pelaksanaan program jambaniasi. Di antaranya ialah masyarakat merasa belum tepat sasaran dalam pemilihan masyarakat yang terdampak karena

dinilai pemilihan sasaran hanya dipilih oleh kelompok yang dekat dengan pemerintah desa terkait. Yang kedua adalah unit bantuan jamban diberikan kepada orang yang tidak memiliki jamban saja, baik yang sebenarnya mampu ataupun tidak mampu. Bahkan masyarakat tersebutpun sudah beberapa kali melakukan protes terhadap pemerintah desa.

Metode

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sementara itu jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari empat poin menurut Daniel Stufflebeam's, yaitu : a. Konteks yaitu Situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perencanaan program, b. Input yaitu kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program bantuan alokasi dana khusus jamban, c. Proses yaitu Pelaksanaan program dan penggunaan fasilitas sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam juknis penerimaan dana bantuan khusus jamban, d. Produk yaitu Hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan program bantuan khusus jamban di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Total informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 orang yaitu Kepala urusan Kesejahteraan kecamatan soko, Petugas puskesmas kecamatan soko, Pemerintah desa, Masyarakat Penerima bantuan jambanisasi, dan Masyarakat bukan penerima bantuan jambanisasi.

Hasil dan Pembahasan

Untuk memberikan makna atau pengertian spesifik dari data dan informasi pada penelitian ini, maka dilakukan analisa dan pembahasan sebagai berikut:

1. Konteks

Tujuan diadakannya program ini adalah :

- a. Memperkuat upaya sanitasi terutama air bersih dan lingkungan bebas kotoran dan tinja.
- b. Menciptakan kebiasaan masyarakat yang tertib serta menumbuhkan kesadaran pentingnya BAB di tempatnya guna menjaga lingkungan bersih dan kesehatan sekitar.
- c. Mempercepat ODF (Open Defecation Free) 100% dimana masyarakat tidak lagi melakukan BAB di sembarang tempat.
- d. Mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagai bentuk upaya penurunan angka kejadian penyakit dan gangguan kebersihan lingkungan serta perilaku lainnya, sebagai mana tertulis dalam PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014.

Jika melihat data hasil seurvey PUSKESMAS Kecamatan Soko yang menugaskan kader kesehatan, sebanyak 444 keluarga tidak memiliki jamban akibatnya

masyarakat tersebut harus melakukan BAB Sembarangan atau menumpang BAB di tetangga sekitar. Penyebab yang sering terjadi adalah karena ketidakmampuan masyarakat untuk membangun jamban karena ekonomi yang kurang mampu. Untuk itu, melihat adanya permasalahan ini, program jambanisasi menjadi Langkah yang diupayakan pemerintah dalam mengurangi permasalahan ini, sebagai bentuk bantuan pembangunan jamban layak untuk masyarakat yang tidak mampu.

Suatu hal yang melatarbelakangi adanya kebutuhan pelaksanaan program jambanisasi adalah sebab tingginya masyarakat yang masih BAB sembarangan di Kabupaten Tuban, salah satu penyebabnya adalah kurangnya ekonomi untuk membangun jamban. Dengan melihat kebutuhan yang dihadapi masyarakat di kabupaten tuban, maka pemerintah mengupayakan program jambanisasi.

Pendanaan bantuan keuangan khusus jambanisasi dilaksanakan dengan metode pola sharing antara APBD Kabupaten Tuban dan APB Desa, dimana dalam pembagian porisnya desa diwajibkan menyediakan sharing pendanaan minimal dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu) dengan nilai per unit yang bersumber dari APB Desa minimal sama dengan nilai per unit pada APBD Kabupaten Tuban. Pelaksanaan bantuan keuangan khusus jambanisasi menggunakan pola swakelola yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) di desa.

Sharing pendanaan dari APB Desa untuk pelaksanaan bantuan keuangan khusus jambanisasi merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak desa.

Proses pembentukan program dimulai dari survey masyarakat BAB sembarangan yang dianjurkan dari Dinas Kesehatan yang menugaskan puskesmas dan dilakukan oleh kader keseharan desa pada bulan april sampai mei. Lalu pada bulan juni data hasil survey tersebut dikaji oleh dinkes untuk dibuatkan program jambanisasi. Lalu DINKES bersama dengan dinas PUPR dan PRKP menentukan spesifikasi bangunan jamban karena RAB harus mendapat persetujuan dari dinas di atas. Pada bulan juli program diajukan ke Bupati dan DPRD untuk disepakati dan ditandatangani untuk ditetapkan. Pada bulan yang sama perbup turun ke dinas sosial P3A dan Pemberdayaan Desa. Bulan agustus mulai dilaksanakan program. Pelaksanaan program berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Dan bulan september direncanakan selesai Pengajuan Laporan pertanggung jawaban. Sehingga dapat diketahui bahwa proses pembentukan sampai telaksananya program adalah mulai dari bulan april sampai sepetember.

Dalam hal ini, pemerintah desa merupakan penanggungjawab bantuan keuangan khusus jambanisasi di tingkat desa. tugas utama dari penanggung jawab diantaranya adalah :

1. menetapkan sasaran penerima
2. melaksanakan kegiatan program
3. mengawasi selama kegiatan program berlangsung.

Dari sini dapat diketahui bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam terselenggaranya kegiatan program jambanisasi.

2. Input

Langkah awal dalam proses pelaksanaan program ialah dimulai dari pembentukan program jambanisasi yang turun dari Peraturan Bupati nomor 188.45/187/KPTS/414.012/2022 tentang pengalokasian besaran bantuan khusus jambanisasi kepada desa tahun 2022. Termasuk didalamnya menentukan berapa unit jamban yang akan dialokasikan di masing-masing desa. Pengalokasian berapa jumlah unit bantuan yang akan turun adalah berdasarkan data yang menunjukkan desa dengan masyarakat yang BAB Sembarangnya masih tinggi.

Total dana yang diberikan untuk 1 unit jamban adalah sebesar Rp 3.000.000,00 yang termasuk untuk membangun jamban, tangki saptik, dan bak air ukuran kecil. Sebagaimana tercantum dalam Petunjuk teknis jambanisasi 2022 dijelaskan bahwa spesifikasi jamban adalah tangki septik harus sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) badan nasioanl, diantara kriterianya adalah harus kedap air, memiliki volume standar, memiliki lubang kontrol, memiliki ventilasi, harus disedot dan dibuang dengan truk tinja secara regular. Hal diatas bertujuan untuk menghindari kontaminasi antara tinja dari pengguna. Tangki septik memberikan solusi agar tinja tidak menecmari sumber air dan lingkungan seri menjadi tempat sumber penyakit.

Penjadwalan pada Rencana anggran belanja untuk tukang adalah selama 3 hari dan untuk pekerja selama 8 hari, namun pada pelaksanaannya kebanyakan hanya membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari, karena dibantu oleh penerima bantuan yang masih memiliki bapak dan anak laki-laki dewasa yang dapat membantu pekrjaan secara fisik.

Berdasarkan data-data di atas dapat diketahui bahwa komitmen pemerintah tuban dalam menanggulangi kasus BAB Sembarangan untuk menuju desa ODF belum cukup serius, hal ini dibuktikan dengan bantuan yang diberikan jauh kurang daripada jumlah yang membutuhkan.

3. Proses

Pada pelaksanaan program tidak ada kendala yang serius, terutama pada pemerintah desa. namun, kendala yang dihadapi ialah beberapa desa yang memiliki tanah yang kurang baik, seperi di daerah pegunungan yang didominasi tanah bebatuan sehingga memperlambat proses penggaian. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah besar dalam pelaksanaan program.

Bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp 3.000.000.00 untuk keseluruhan bahan bangunan dan upah tukang bangunan, tidak termasuk konsumsi tukang selama mengerjakan, semisal pemberian rokok, snack, kopi atau minuman lainnya. Namun hal tersebut dianggap wajar dan tidak jadi masalah.

Dalam proses pembangunan jamban pemerintah desa telah menjalankan tugasnya sebagai pengawas, terbukti yang rutin melakukan pengecekan pada kinerja tukang. Pada realitanya permasalahan yang terjadi adalah penerima bantuan bukanlah orang yang benar-benar tidak mampu alias miskin. Memang dengan

kriteria berpenghasilan rendah sudah sesuai dengan kriteria penerima sebagaimana tertulis di juknis. Namun, rata-rata penerima masih memiliki aset yang cukup, seperti kebun ataupun hewan ternak. Sehingga, kepuasan masyarakat belum tepat dalam konteks ini.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan ternyata salah satu kesalahan dalam menentukan penerima adalah langsung menunjuk menurut pemerintah desa. padahal dalam prosedur penunjukan penerima bantuan yang telah dijelaskan pada petunjuk juknis adalah dengan melakukan rebug warga. Namun, dalam pelaksanaannya hal ini tidak dilaksanakan. Sehingga pada pelaksanaan program ini ternyata fakta di lapangan membuktikan kurang tepatnya sasaran penerima manfaat bantuan. Ialah pada beberapa penerima bantuan bukanlah masyarakat dengan penghasilan paling rendah. Sementara, beberapa masyarakat yang tidak memiliki jamban ada juga yang benar-benar tidak mampu dalam hal ekonomi. Akhirnya masyarakat yang seharusnya diprioritaskan malah justru tidak mendapat bantuan.

Beberapa penerima tersebut, memang sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan sebagaimana tertera dalam petunjuk teknis yaitu masyarakat dengan penghasilan rendah, namun tidak dijelaskan berapa penghasilan rendah yang dimaksud, sementara penerima adalah masyarakat dengan penghasilan rendah namun masih memiliki aset berupa hasil ternak atau hasil kebun.

4. Output

Unit jamban yang didapat sangat membantu warga yang tidak memiliki jamban, mulai dari harus menumpang di tetangga dan berjalan ke lahan kosong, pada akhirnya dapat memiliki jamban walaupun jamban yang didapat bukannya jamban yang bagus. Jumlah bantuan yang sudah terealisasi di kecamatan soko adalah 49 jamban.

Bentuk jamban pun sebagaimana tercantum pada denah, bahwa jamban yang dimaksud ialah memasangkan wc, bak mandi ukuran kecil dan terhubung dengan septik tank, tanpa dindin tembok maupun lantai keramik. Untuk mengetahui lebih jelas gambarnya dapat dilihat pada lampiran gambar.

Time line yang dijadwalkan adalah satu bulan untuk menyelesaikan 49 unit jamban. Dengan rincian 2 atau 3 hari bagi tukang, dan 4 hari bagi pekerja untuk menyelesaikan satu unit jamban. Salah satu sumber masalah yang mengakibatkan adanya perilaku tersebut ialah karena ketidakmampuan masyarakat dalam membangun jamban karena faktor ekonomi. Oleh karenanya, program bantuan ini diturunkan. Dalam pelaksanaannya, hasil berupa 49 unit jamban sudah terealisasi dengan baik dan sudah digunakan sesuai dengan fungsinya. Upaya pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam hal sanitasi dan kesehatan lingkungan dapat telaksana dengan baik. Terbukti dengan menurunnya angka masyarakat yang melakukan BAB sembarangan

yang dilakukan pendataan kembali oleh tim kader kesehatan desa pada bulan februari 2023.

Pada tahun 2021, masih didapati 705 keluarga yang tidak memiliki jamban di kecamatan soko, yang mana angka tersebut masih dikategorikan tinggi, sehingga program jambanisasi pada tahun 2022 merupakan program jambanisasi pertama dari pemerintah Tuban guna mengurangi angka BAB Sembarangan. Dana didapat dari dengan metode pola sharing 1 : 1, artinya jika dari APBD memberikan 1 unit bantuan, maka dari APBDes harus memberikan 1 unit juga.

Namun pada tahun 2022, angka BAB Sembarangan telah menurun secara signifikan, dari 705 menjadi 444 keluarga yang tidak memiliki jamban telah diberikan bantuan. Maka pada tahun selanjutnya (2023) akan diadakan program jambanisasi lagi. Namun, dana yang dipakai tidak sama dengan program jambanisasi tahun 2022. Dana yang dipakai pada tahun 2023 adalah dana dari APBDes secara keseluruhan. Jumlah unit bantuan juga tidak sebanyak tahun 2022. Hal ini dikarenakan sudah berkurangnya jumlah masyarakat yang BAB Sembarangan karena telah diberikan bantuan jamban pada tahun 2022.

Kesimpulan

Pernyataan Ditinjau dari beberapa faktor evaluasi yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut

1. **Konteks** : Dalam perumusan sasaran dan tujuan program sudah tepat yaitu untuk mengurangi angka BAB sembarangan demi terciptanya sanitasi yang baik di Kabupaten Tuban khususnya di daerah-daerah yang belum maju. pembagian porisnya desa diwajibkan menyediakan *sharing* pendanaan minimal dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu) dengan nilai per unit yang bersumber dari APB Desa minimal sama dengan nilai per unit pada APBD Kabupaten Tuban. Pelaksanaan bantuan keuangan khusus jambanisasi menggunakan pola swakelola yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) di desa.
2. **Input** : beberapa desa pemilihan penerimanya belum sesuai sasaran meski sudah sesuai kriteria yang ada di dalam juknis, yaitu poin utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan pada teknis penentuan penerima bantuan tidak sesuai dengan juknis, yang mana harus melakukan rebug warga dulu, namun pada pelaksanaannya pemerintah desa langsung menentukan penerima bantuan tanpa melakukan rebug dengan warga. Sehingga yang terjadi adalah ketidaktepatan sasaran. Beberapa penerima memang terbelang berpenghasilan rendah, namun masih memiliki aset berupa lahan, sawah, ataupun hewan ternak.
3. **Proses** : Pada pelaksanaan program tidak ada kendala yang serius, seperti terdapat daerah yang mayoritas tanahnya didominasi bebatuan di daerah pegunungan dan memperlambat proses penggalian tanah, hal berdampak pada pekerjaan yang molor. Begitu pula dalam pendanaannya, bantuan turun tepat

pada yang sudah dijadwalkan, bantuan turun sebesar Rp 3.000.000,00 per unit dan dapat mencakup kebutuhan dan menyelesaikan pengerjaan jamban.

- 4. Produk :** hasil yang dicapai yaitu berupa 49 jamban dengan spesifikasi septic tank, jamban dan bak air terlaksana dengan baik, sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu untuk mengerjakan 1 unit diperlukan 3 hari bagi tukang. Namun untuk pekerja, pelaksanaan lebih cepat daripada rencana yang tertulis. Dampak yang terjadi adalah sekitar 70% masyarakat yang tadinya masih BAB sembarangan mulai menyadari pentingnya sanitasi, sehingga yang masih BAB sembarangan diperkirakan hanya keluarga yang belum mendapat bantuan.

Berikut adalah saran yang dihasilkan dari penelitian ini, setidaknya untuk *stakeholder* kebijakan. Dalam membuat kebijakan khususnya pada kriteria penerima bantuan hendaklah lebih spesifik lagi terkait kriterianya, seperti kriteria dengan penghasilan rendah, hendaklah dijabarkan berapa nominal penghasilan yang dikategorikan rendah tersebut. Kemudian, bagi pemerintah desa hendaklah menjalankan tugas sebagaimana tertulis dalam petunjuk tekni, tidak lagi ada menghilangkan bagian atau urutan yang telah tercantum dalam petunjuk teknis untuk memperkecil kemungkinan terjadi kesalahan terutama dalam menentukan sasaran atau penerima bantuan. Begitupun kepada pemerintah kabupaten diharapkan memiliki komitmen yang lebih serius dalam mengupayakan desa ODF di kabupaten Tuban

Referensi

- Globika Nurika, 2015, Evaluasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Menuju Kelurahan Open Defecation Free Di Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
- Charles Foeh, Tri Joko, Yusniar Hanani D. 2021, Evaluasi Pelaksanaan Pilar Pertama Stop Buang Air Besar Sembarangan Pada Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Nagekeo.
- Farouk Ilmid Davik, 2021, Evaluasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Stop BABS di Pukesmas Kabupaten Probolinggo.
- Hesty Novika Indah Sari, 2020, Evaluasi program jambanisasi di Kutawuluh, Jebengplampitan, Sukoharjo, Wonosobo,
- Ais Dafitri dan Bambang Budi Raharjo, 2019, Evaluasi program Rencana Aksi Daerah Percepatan Kabupaten Demak Bebas Buang Air Besar Sembarangan.
- Erlinawati Pane, 2019, Pengaruh Perilaku Keluarga terhadap Penggunaan Jamban.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru). Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.



Daniel L. Stufflebeam , Guili Zhang, 2017, The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability 1st Edition.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2016
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D, Alfabeta, Bandung, 2016